

Peran Strategis Sektor Publik dalam Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Suci Kharani¹, Fitria Safwa Irfani²

^{1,2}Pascasajana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*sucikhrani@gmail.com

Abstrak

Sektor publik memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan umum. Kinerja sektor publik yang baik tercermin melalui efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis sektor publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, artikel ini mengkaji bagaimana kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan reformasi birokrasi menjadi elemen kunci dalam peningkatan pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan sektor publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat, penguatan partisipasi publik, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi peran sektor publik tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Sektor publik, pelayanan masyarakat, kinerja pemerintahan, kesejahteraan, tata kelola.

1. PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan suatu negara yang memiliki tanggung jawab besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan sektor publik tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan birokrasi, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sektor publik yang dimaksud mencakup lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta instansi lain yang menjalankan fungsi pelayanan masyarakat melalui kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan penyediaan infrastruktur.

Dalam era globalisasi dan desentralisasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini menempatkan sektor publik dalam posisi yang sangat strategis, karena kualitas pelayanannya berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat dan, lebih jauh lagi, terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan umum. Ketika pelayanan publik dilaksanakan secara optimal, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, transportasi, dan perlindungan sosial dengan lebih mudah dan merata.

Kinerja sektor publik menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Kinerja yang baik tercermin dari sistem administrasi yang efisien, sumber daya manusia yang kompeten, penggunaan teknologi informasi yang memadai, serta adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Sebaliknya, kinerja yang buruk sering kali berujung pada rendahnya tingkat kepuasan masyarakat, tingginya angka keluhan terhadap pelayanan, serta munculnya berbagai bentuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Reformasi birokrasi yang telah diupayakan pemerintah sejak beberapa dekade terakhir merupakan salah satu bentuk kesadaran akan pentingnya memperbaiki kinerja sektor publik. Langkah-langkah seperti penyederhanaan prosedur, penerapan e-government, penguatan pengawasan internal, hingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dilakukan untuk mendorong sektor publik agar lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan. Namun, di lapangan, implementasi dari kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti budaya birokrasi yang kaku, kurangnya integritas, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antarlembaga.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari semua kebijakan publik yang dijalankan oleh sektor publik. Dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah diharapkan mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warganya, termasuk di antaranya hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman. Oleh karena itu, sektor publik harus mampu merancang dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak serta mengurangi ketimpangan sosial. Pelayanan yang bersifat inklusif, partisipatif, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan yang merata.

Lebih jauh lagi, sektor publik juga memegang peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah menjadi komitmen global. Setiap dimensi dalam SDGs—baik yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang layak, hingga pembangunan infrastruktur dan tata kelola yang baik—tidak akan tercapai tanpa kontribusi nyata dari sektor publik. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat diperlukan agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Di Indonesia, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik telah menjadi prioritas nasional yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun demikian, tantangan seperti disparitas antarwilayah, rendahnya literasi digital, dan terbatasnya akses di daerah tertinggal masih menjadi hambatan serius yang perlu segera diatasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran strategis sektor publik dalam meningkatkan pelayanan publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan menggali berbagai faktor yang memengaruhi kinerja sektor publik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mendorong sektor publik menjadi lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga menjadi masukan strategis bagi para pengambil kebijakan dalam merancang dan melaksanakan pelayanan yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran strategis sektor publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta implikasinya terhadap kesejahteraan umum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara komprehensif dan kontekstual berdasarkan data yang bersifat naratif dan interpretatif, bukan angka statistik semata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka (library research). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, serta laporan lembaga-lembaga riset terpercaya yang membahas tentang pelayanan publik, kinerja

sektor publik, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, artikel dan laporan dari organisasi internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP), World Bank, dan OECD juga menjadi referensi untuk memahami praktik terbaik dalam tata kelola sektor publik di berbagai negara.

Proses analisis data dilakukan melalui analisis konten (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola hubungan, dan konsep-konsep kunci yang muncul dari literatur yang dikaji. Selanjutnya, data dianalisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang terstruktur mengenai bagaimana sektor publik menjalankan perannya, faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya, serta dampaknya terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur untuk menghindari bias informasi dan memastikan konsistensi temuan.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada institusi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia, dengan meninjau kebijakan pelayanan publik yang telah dijalankan, tantangan implementasinya, serta capaian dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan secara langsung, melainkan memberikan tinjauan teoritis dan konseptual sebagai landasan bagi studi lanjutan yang lebih empiris di masa mendatang. Melalui metode ini, diharapkan artikel dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan strategi sektor publik yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor publik memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik serta dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan analisis dari berbagai literatur dan dokumen kebijakan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sektor publik dalam menyelenggarakan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis administratif semata, melainkan juga oleh komitmen politik, tata kelola yang baik (good governance), partisipasi masyarakat, serta inovasi dalam penyelenggaraan layanan. Sektor publik yang berorientasi pada pelayanan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu menjawab tantangan sosial secara cepat dan tepat terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu temuan utama dari kajian ini adalah pentingnya transformasi budaya birokrasi dalam mendukung kualitas pelayanan. Banyak studi menggarisbawahi bahwa budaya birokrasi yang kaku, prosedural, dan tertutup menjadi penghambat utama dalam penyampaian layanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan pergeseran paradigma dari birokrasi yang bersifat "command and control" menuju birokrasi yang bersifat pelayanan (service-oriented). Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan aparatur sipil negara untuk meningkatkan kompetensi dan etika pelayanan, pemangkasan prosedur birokrasi, serta digitalisasi layanan guna mengurangi waktu dan biaya administrasi. Program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa dekade terakhir menjadi fondasi penting dalam upaya ini, meskipun implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi tantangan yang beragam.

Penelitian juga menemukan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan program pemerintah. Pelayanan publik yang transparan mampu menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan akuntabilitas mendorong adanya tanggung jawab dari setiap lembaga publik untuk menyampaikan hasil kinerjanya kepada publik. Dalam hal ini, sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terstandar menjadi penting untuk menilai efektivitas layanan, baik dalam bentuk indikator kuantitatif seperti waktu pelayanan dan jumlah

penerima manfaat, maupun indikator kualitatif seperti kepuasan masyarakat dan persepsi publik terhadap keadilan layanan.

Temuan lain yang signifikan adalah bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelayanan publik. Desentralisasi pemerintahan di Indonesia membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pelayanan, namun pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan koordinasi, khususnya dalam hal kesenjangan kapasitas antara daerah maju dan tertinggal. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia yang memadai, didukung oleh anggaran yang cukup serta kepemimpinan yang visioner, mampu menghadirkan layanan publik yang inovatif dan tepat sasaran. Sebaliknya, di daerah dengan kapasitas lemah, pelayanan publik cenderung stagnan dan tidak merata, sehingga berdampak pada ketimpangan kesejahteraan antarwilayah.

Penting juga untuk dicatat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan program. Partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk forum konsultasi publik, musyawarah pembangunan, maupun pengawasan sosial melalui media dan lembaga swadaya masyarakat, menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa layanan publik benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini juga mendorong lahirnya budaya pelayanan yang partisipatif dan memperkuat kontrol sosial terhadap sektor publik.

Adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pemerintah telah mengembangkan berbagai platform digital seperti layanan administrasi online, e-budgeting, dan aplikasi pengaduan masyarakat, yang terbukti mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas. Namun demikian, kesenjangan digital di masyarakat masih menjadi kendala, terutama di wilayah pedesaan atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana akses internet dan literasi digital masih terbatas. Oleh karena itu, pengembangan layanan digital harus diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkannya secara optimal.

Terakhir, penelitian ini menekankan bahwa pelayanan publik yang baik memiliki korelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai indikator seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), serta meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintah. Artinya, keberhasilan sektor publik dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas bukan hanya menghasilkan output administratif, tetapi juga outcome yang nyata dalam bentuk perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa sektor publik yang memiliki kinerja tinggi, bersih, dan melayani adalah kunci dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan adil. Perbaikan sistem, peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi, serta pelibatan masyarakat secara aktif merupakan elemen-elemen strategis yang harus terus dikembangkan oleh pemerintah agar pelayanan publik dapat benar-benar menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

4. PEMBAHASAN

Temuan dalam penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sektor publik memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan umum. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator keberhasilan sektor publik dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan dasar, pengelola sumber daya publik, serta fasilitator dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sektor publik tidak hanya dapat diukur melalui output administratif semata, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Dari hasil analisis literatur dan data sekunder, tampak jelas bahwa pelayanan publik yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola sektor publik, khususnya dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Pemerintah yang mampu mengelola anggaran secara efisien, memberikan informasi secara terbuka kepada publik, serta memastikan bahwa setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini pada gilirannya menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, ketika sektor publik lemah dalam akuntabilitas dan transparansi, masyarakat cenderung tidak puas, merasa terpinggirkan, dan bahkan dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.

Selanjutnya, pembahasan ini menekankan bahwa sektor publik perlu mengubah pendekatan birokrasi konvensional yang bersifat prosedural, hierarkis, dan tertutup menuju pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis hasil. Reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia, seperti penyederhanaan proses layanan, digitalisasi birokrasi, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara, merupakan langkah positif yang harus terus dilanjutkan dan diperkuat. Namun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, terutama dalam hal ketimpangan kualitas layanan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur di daerah 3T, serta resistensi terhadap perubahan dari internal birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, pembenahan sektor publik tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, tetapi juga komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Peran teknologi dalam mendukung pelayanan publik juga menjadi sorotan penting dalam pembahasan ini. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan pemerintah menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses dari mana saja. Kehadiran aplikasi pelayanan administrasi berbasis daring, sistem pengaduan publik online, serta platform keterbukaan data publik memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat dan mempercepat penyelesaian masalah. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar dalam pemerataan akses teknologi, terutama di daerah pedalaman dan terpencil. Pemerintah perlu menyeimbangkan inovasi digital dengan penyediaan infrastruktur dan literasi digital agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat pelayanan yang setara.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, pembahasan ini menyoroti pentingnya pendekatan pelayanan publik yang inklusif dan berpihak kepada kelompok rentan. Pelayanan publik yang berkualitas harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, disabilitas, lansia, dan masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan semangat keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Pancasila dan konstitusi Indonesia. Program-program seperti jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial, dan pendidikan gratis merupakan contoh konkret bagaimana sektor publik dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup. Namun, tantangan tetap ada dalam hal pendataan yang akurat, distribusi yang merata, serta pengawasan terhadap penyelewengan dalam pelaksanaan.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sektor publik sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan sesuai dengan karakteristik lokal. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah berhasil mendorong inovasi pelayanan publik, seperti lahirnya Mal Pelayanan Publik, sistem pelayanan satu pintu, serta kebijakan berbasis data lokal. Namun demikian, keberagaman kapasitas antar daerah menyebabkan kualitas pelayanan tidak merata. Pemerintah pusat perlu memberikan bimbingan teknis, dukungan anggaran, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar standar pelayanan minimal dapat diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah.

Akhirnya, diskusi ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian esensial dalam mewujudkan layanan yang relevan dan berkelanjutan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi layanan publik, maka akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas sosial dan mendorong budaya pelayanan yang lebih terbuka, responsif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Oleh karena itu, sektor publik harus membangun mekanisme partisipatif yang terstruktur, termasuk melalui musyawarah pembangunan, forum warga, serta media digital sebagai sarana aspirasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menyimpulkan bahwa sektor publik memegang peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, adil, dan merata. Upaya perbaikan sektor publik harus bersifat menyeluruh, mencakup aspek kelembagaan, kebijakan, sumber daya manusia, teknologi, serta partisipasi masyarakat. Dengan strategi yang tepat, sektor publik dapat menjadi motor utama pembangunan yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Keberhasilan sektor publik tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat dan banyak layanan yang disediakan, tetapi juga oleh sejauh mana layanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kinerja sektor publik yang baik tercermin dalam sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien. Pelayanan publik yang diselenggarakan secara profesional dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian pembangunan yang berkeadilan sosial.

Reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas aparatur negara merupakan komponen penting yang harus terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan publik, menjadi faktor kunci dalam menciptakan layanan yang adaptif dan tepat sasaran. Kesetaraan akses, terutama bagi kelompok rentan dan daerah tertinggal, juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan publik. Dengan demikian, sektor publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat akan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

REFERENSI

- Agus Purnomo Adi Putra, N. G. (2015). PENILAIAN KINERJA BERBASIS VALUE FOR MONEY ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABANAN. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 252-268.
- Gabriela Thalia Wuwungan, J. T. (2019). PENERAPAN METODE VALUE FOR MONEY SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI DINAS KESEHATAN KOTA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi*, 354-361.
- Ismail Nurdin, F. M. (2023). Efektifitas Penilaian Kinerja Pegawai Sektor Publik di Indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*, 495-502.
- Mutiya Krisanty, M. W. (2022). Evaluasi Konsep Value for Money terhadap Penilaian Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 141-147.
- Oliviana Kojo, J. J. (2019). ANALISIS PENILAIAN KINERJA SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA). *Jurnal EMBA*, 4281-4290.

Yulaikah, S. A. (2014). PENERAPAN METODE BALANCE SCORECARD SEBAGAI TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (Studi Pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta). *JURNAL AKUNTANSI*, 23-42.